

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Capaian Kinerja Makro

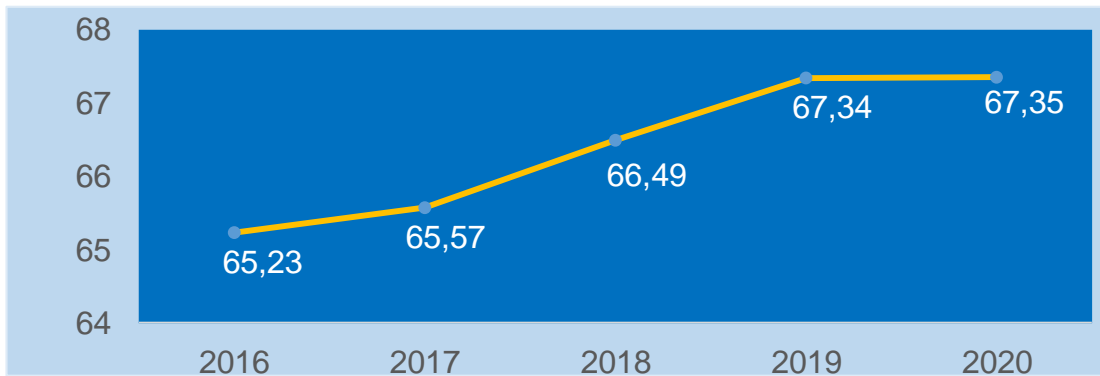
Aspek kesejahteraan ekonomi yang penting diukur adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem atau laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010, Penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kabupaten Karangasem periode tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karangasem mencapai 67,34 dan IPM tahun 2010 sebesar 67,35 Secara rinci perkembangan IPM Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Garfik 1.1
IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2020

2) Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. BPS menggunakan beberapa indikator dalam pengukuran tingkat kemiskinan, yaitu Garis Kemiskinan (GK), persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinan.

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020

Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	27.120	27.020	26.020	25.990	24.690
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,61	6,55	6,28	6,25	5,91

Sumber Data: BPS Provinsi Bali, BPS Kab. Karangasem, 2019

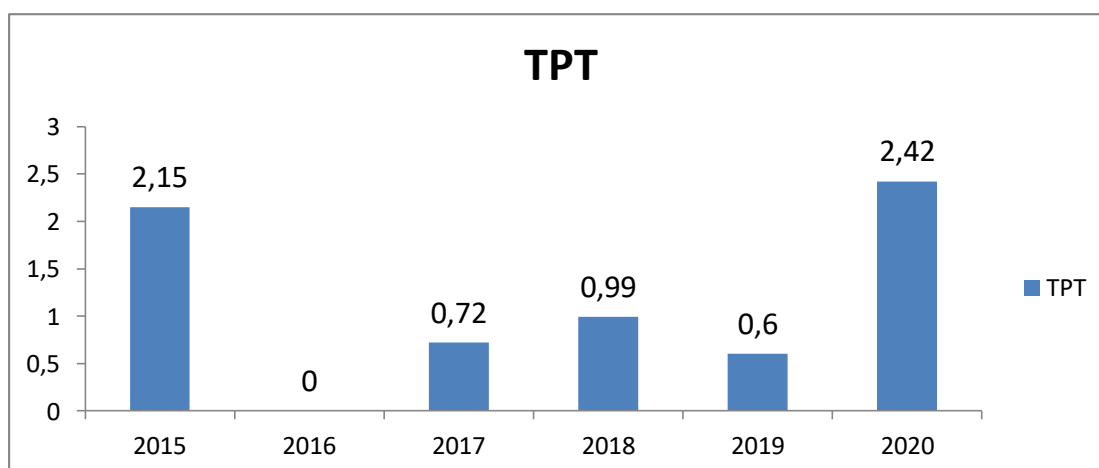
Dalam kurun waktu 2016-2020 Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Karangasem mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 27.120 jiwa (6,61%) turun menjadi 24.690 jiwa (5,91%) pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena beberapa program dan kebijakan pemerintah sudah dapat berjalan seperti bedah rumah, program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

3) Angka Pengangguran

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Bali, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Terendah di Bali. Terhadap hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang ada sebagian besar sudah terserap di sektor formal maupun non formal, tahun 2016 tidak dilaksanakan survei, seperti dalam Tabel Berikut :

Grafik 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2020

4) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2010 tahun 2019 mencapai 11,13 triliun. Angka tersebut naik 10,55 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,48 persen.

Kabupaten Karangasem sebagai daerah pertanian menjadi pendorong lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi lapangan usaha yang dominan dengan pertumbuhan cukup tinggi ditengah

melambatnya sebagian besar lapangan usaha di Kabupaten Karangasem lapangan usaha ini mampu tumbuh sebesar 2,85 persen tahun 2019.

Tumbuhnya ekonomi Kabupaten Karangasem banyak dipengaruhi oleh tumbuhnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian, jasa pendidikan penyediaan akomodasi dan makan minum dan jasa lainnya dalam pembentukan nilai tambah di Kabupaten Karangasem.

Pada kurun waktu 2015 – 2019 Lapangan usaha dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,93 persen, kemudian lapangan usaha jelas pendidikan dengan rata – rata pertumbuhan 8,75 persen, dan yang ketiga lapangan usaha jasa lainnya dengan rata-rata pertumbuhan 8,65 persen.

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karangasem

Laju Pertumbuhan Ekonomi	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Karangasem	6,00	5,95	5,06	5,48	5,50

Sumber Data: BPS Provinsi Bali, BPS Kab. Karangasem, 2020

5) Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita Karangasem tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 30,10 juta. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap penduduk di Karangasem menerima pendapatan sebesar Rp 30,10 juta selama tahun 2015, atau sekitar Rp 2,5 juta perbulannya. Besarnya PDRB perkapita atas dasar harga konstan mencapai Rp 17,79 juta maka tahun 2015 sudah mencapai Rp 22 juta. Adapun PDRB perkapita pada tahun 2017 besarnya mencapai Rp 35,53 Juta atas dasar harga berlaku (ADHB), dan PDRB Kab Karangasem baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2010 pada tga tahun terakhir mengalami trend yang positif. PDRB Kab Karangasem pada tahun 2019 mencapai 41,06 ribu rupiah.

Tabel 1.3
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem (ribu rupiah)	2015	2016	2017	2018	2019
ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)	29,93	32,65	35,36	38,27	41,06
ADHK (Atas Dasar Harga Konstan)	22,00	23,18	24,24	25,44	26,73

Sumber Data: BPS Provinsi Bali, BPS Kab. Karangasem, 2020

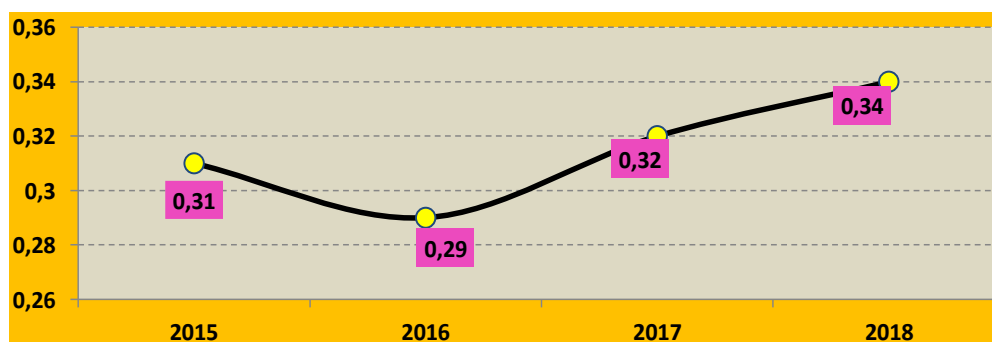
6) Indeks Gini Rasio (Ketimpangan Pendapatan)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan masyarakat Kab Karangasem tahun 2018 sebesar 0,34 mengalami peningkatan sebesar 0,02 dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 0,32 namun hal ini masih dalam batas kewajaran dan masih dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi.

Grafik 1.3

Indeks Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2018



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2020

Tabel 1.4
Rekapan Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indek Pembangunan Manusia	67,34	67,35	0,01
2	Angka Kemiskinan	25.990	24.690	-5,27
3	Angka Pengangguran	0,6	2,42	75,21
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,48	5,50	0,36
5	Pendapatan Per Kapita	38,27	41,06	6,79
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,32	0,34	5,88

Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2020

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

2.1 Ringkasan Capaian Kinerja Kunci Keluaran/Output

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	44 Satuan Pendidikan	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	743 Peserta	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	460 Kebutuhan Minimal	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	376 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	374 Pendidik	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	162 Kepala Sekolah	Disdikpora	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	402 SD dan SMP	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.220 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3.088 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	44.477 Peserta Didik	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20.935 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.045 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.439 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.518 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.125 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	299 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	312 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	333 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama tenaga kependidikan pada jenjang	326 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)			
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.836 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	658 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	330 Kepala Sekolah	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah	47 Kepala Sekolah	Disdikpora	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2 Tenaga Penunjang	Disdikpora	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	396 SD dan SMP	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.131 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.978 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	44.477 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20.935 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.045 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.439 Kebutuhan	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.496 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.097 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	299 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	312 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	333 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	326 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.836 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	658 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon	330 Kepala Sekolah	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kepala sekolah			
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	47 Kepala Sekolah	Disdikpora	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2 Tenaga Penunjang	Disdikpora	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	10 Satuan Pendidikan	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima Perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	815 Peserta Didik	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	58 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	239 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	195 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	11 Kepala Sekolah	Disdikpora	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3 RS	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3 RS	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	807.218 logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	132 orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	30 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	149 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12.914 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	205 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6.847 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	139 Orang	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	614 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	262 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.500 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35.845 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.500 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.500 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.448 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12.321 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	55 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	160.154 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	69 Orang	Diskes	
3	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	864 Ha	Dis PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	2.300 m	Dis PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	63,80 Ha	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	1.140 m	Dis PUPR	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	SK. Kepala DPUPR Kab. Karangasem No. 01 Tahun 2020 Tentang Pembagian Tugas Pengamat, Juru Pengairan, Penjaga Bendung/ Pintu Air dan Penjaga Embung pada Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. Karangasem T.A. 2020	Dis PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/ kota	DED Perencanaan Irigasi : 16 Paket DED Perencanaan Sugai : 4 Paket DED Perencanaan Mata Air : 1 Paket DED Perencanaan Pantai : 2 Paket	Dis PUPR	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Panjang bangunan pantai : 3.319 m Panjang bangunan sungai : 1.709 m	Dis PUPR	
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	864 Ha	Dis PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	2.300 m	Dis PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	63,80 Ha	Dis PUPR	
		Panjang pantai di kawasan	1.140 m	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)			
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	SK. Kepala DPUPR Kab. Karangasem No. 01 Tahun 2020 Tentang Pembagian Tugas Pengamat, Juru Pengairan, Penjaga Bendung/ Pintu Air dan Penjaga Embung pada Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. Karangasem T.A. 2020	Dis PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	DED Perencanaan Irigasi : 16 Paket DED Perencanaan Sugai : 4 Paket DED Perencanaan Mata Air : 1 Paket DED Perencanaan Pantai : 2 Paket	Dis PUPR	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Panjang bangunan pantai : 3.319 m Panjang bangunan sungai : 1.709 m	Dis PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) 222.440,4 m ----- x 100% = 72,12% Panjang jaringan irigasi primer (m) 308.415 m	Dis PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) 12.594,7 m ----- x 100% = 66,94% Panjang jaringan irigasi sekunder (m) 18.814,7 m	Dis PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ----- x 100% = 0% Panjang jaringan irigasi tersier (m)	Dis PUPR	
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	1 Dokumen	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Pemuktakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Karangasem 2016-2019	Dis PUPR	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota Penyelenggaraan SPAM	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2 Kerja Sama	Dis PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	123.861 Rumah (KK)	Dis PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	3.237 Rumah (KK)	Dis PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	127.098 Rumah (KK)	Dis PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur	145 Rumah	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		tinja			
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	146 Rumah	Dis PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	127.098 Rumah (KK)	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/ha}} = \frac{123.861 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 87,67\%$	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/ha}} = \frac{89 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 0,06\%$	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} = \frac{3.237 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 2,29\%$	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\Sigma \text{ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} = \frac{123.861 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 87,67\%$	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\Sigma \text{ jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}} = \frac{3 \text{ Unit}}{3 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\Sigma \text{ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} = \frac{1,5 \text{ m}^3/\text{hari}}{30 \text{ m}^3/\text{hari}} \times 100\% = 5\%$	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\Sigma \text{ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\Sigma \text{ jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\% = \frac{3.237 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 2,29\%$	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\Sigma \text{ jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\Sigma \text{ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100\% = \frac{89 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 0,06\%$	Dis PUPR	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\Sigma \text{ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\Sigma \text{ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\% = 0\%$	Dis PUPR	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	99 IMB	Dis PUPR	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	2 Dokumen	Dis PUPR	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	6 Buah Bangunan Gedung	Dis PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	216 Buah	Dis PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	216 Buah	Dis PUPR	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.202,54 Km	Dis PUPR	
		Panjang jalan yang dibangun	2 KM	Dis PUPR	
		Panjang jembatan yang dibangun	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	2.920 Km	Dis PUPR	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Panjang jalan yang dipelihara	8,98 Km	Dis PUPR	
		Panjang jembatan yang dipelihara	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator /teknisi /analisis di wilayah Kabupaten/kota	10 Orang	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi / analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	10 Orang	Dis PUPR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	457 Orang	Dis PUPR	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Aplikasi SIPJAKI	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai	Ada	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	10 Sertifikat	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	457 Sertifikat	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	41 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tersedia	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	104 Badan Usaha	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	72 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	41 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	41 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	35 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Jumlah pengawasan Terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	8.121 ha	Dis Perkim	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah luasan (Ha) kawasan	12,41 Ha	Dis Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		permukiman kumuh < 10 Ha			
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	4.277 Unit	Dis Perkim	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,79.895 Ha	Dis Perkim	
		Jumlah rumah di kab/kota	253.171 Rumah	Dis Perkim	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	4.277 Unit	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tidak layak huni	8.121 Unit	Dis Perkim	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{jumlah KK}}{\text{jumlah total unit rumah}} = \frac{253.171}{253.171}$	Dis Perkim	
		Jumlah rumah pembangunan baru	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Jumlah pengaduan yang ditangani = 55 -----x 100% = 91,67% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 60	SatPol PP	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Satlinmas yang dikukuhkan = 2230 ----- x 100% = 80,27% Satlinmas yang terlatih = 2778	SatPol PP	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda / Perkada yang memuat Sanksi yang ditegakkan = 11 -----x 100% = 100% Jumlah keseluruhan Perda / Perkada yang memuat Sanksi = 11	SatPol PP	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki kualitas PPNS = 1 -----x 100% = 1,06% Jumlah Polisi Pamong Praja = 94	SatPol PP	
		Tersedianya SOP dalam penegakan	Ada	SatPol PP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			
		Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	SatPol PP	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i>x 100%= 0 <i>Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan</i>	BPBD	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	<i>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i> 519.998= <i>Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i> 519.998 x 100%= 100%	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i>x 100%= 0 <i>Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan</i>	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i>x 100%= 0 <i>Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan</i>	BPBD	
		Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan</i>x 100%= 0 <i>Jumlah aparaturnya dengan warga negara di kawasan rawan bencana</i>	BPBD	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah warga negara yang ikut pelatihan</i>x 100%= 0 <i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	<i>jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops</i> = $\frac{519.998}{519.998} \times 100\% = 100\%$ <i>jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	<i>jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan</i> = $\frac{519.998}{519.998} \times 100\% = 100\%$ <i>jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>	BPBD	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	<i>jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB</i>x 100%= 0 <i>jumlah seluruh penetapan status KLB</i>	BPBD	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	<i>jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana</i> = $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <i>jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</i>	BPBD	SK Darurat Covid
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	<i>jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</i> = $\frac{35}{84} \times 100\% = 41,66\%$ <i>jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana</i>	BPBD	SK Tim TRC, EWS, Pusdalops
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	<i>jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi</i> = $\frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$ <i>Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana</i>	BPBD	Data Rekap Korban Bencana (Meninggal, Luka Ringan, Luka Berat)
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh	<p style="text-align: center;">Jenis Layanan = 10 Layanan Jumlah Layanan = 71 Layanan</p>	Dis Damkar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Dis Damkar	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Dis Damkar	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Ada	Dis Damkar	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Ada	Dis Damkar	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Diklat pemadam I = 50 Orang	Dis Damkar	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	Dis Damkar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	0	Dis Damkar	
6	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	0	Dis Sosial	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0	Dis Sosial	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	55 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	0	Dis Sosial	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	5 Kendaraan	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	75 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima	0	Dis Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		paket sandang			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	17 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dis Sosial	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dis Sosial	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dis Sosial	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	56 Orang TAGANA; 7 Orang Tenaga Pelopor Perdamaian; 156 Orang PSM; 78 Karang Taruna; 6 Orang Pekerja Sosial LK3; 4 Orang Pekerja Pendamping Disabilitas, Anak Terlantar dan Gelandangan.	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	20 Orang	Dis Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	384 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah korban bencana yang	70 KK	Dis Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		mendapatkan makanan			
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	38 Paket	Dis Sosial	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dis Sosial	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dis Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dis Sosial	
		Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	56 Orang TAGANA; 7 Orang Tenaga Pelopor Perdamaian; 156 Orang PSM; 78 Karang Taruna; 6 Orang Pekerja Sosial LK3; 4 Orang Pekerja Pendamping Disabilitas, Anak Terlantar dan Gelandangan.	Dis Sosial	

2.2 Ringkasan Capaian Kinerja Kunci Hasil/Outcome

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD } 6.375}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan } 14.547} \times 100\% = 46,30\%$	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar } 40.920}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan } 41.158} \times 100\% = 99,42\%$	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama } 17.097}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan } 20.366} \times 100\% = 83,95\%$	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan } 74.308}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan } 83.420} \times 100\% = 89,08\%$	Disdikpora	
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan } 355}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten/kota } 519.998} \times 100\% = 0,068$	Diskes	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi } 3}{\text{Jumlah RS di kabupaten/kota } 3} \times 100\% = 100\%$	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i> 6.598 -----x100%= 95,43% <i>Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota</i> 6.914	Diskes	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	<i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan</i> 6.920 -----x100%= 104,86% <i>Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota</i> 6.599	Diskes	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i> 6.671 -----x100%= 106,14% <i>Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota</i> 6.285	Diskes	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<i>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i> 23.007 -----x100%= 90,81% <i>Jumlah balita di kabupaten/kota</i> 25.334	Diskes	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i> 28.719 -----x100%= 45,15% <i>Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota</i> 63.602	Diskes	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<i>Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i> 95.743 -----x100%= 37,80% <i>Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota</i> 253.300	Diskes	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai	<i>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i> 33.133 -----x100%= 52,82% <i>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota</i> 62.732	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p><i>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> 44.379 -----x100%= 51,13%</p> <p><i>Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota</i> 86.791</p>	Diskes	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p><i>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> 3.815 -----x100%= 86,18%</p> <p><i>Jumlah penderita DM di kabupaten/kota</i> 4.427</p>	Diskes	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	<p><i>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> 1.051 -----x100%= 83,75%</p> <p><i>Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota</i> 1.255</p>	Diskes	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	<p><i>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i> 924 -----x100%= 39,71%</p> <p><i>Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota</i> 2.327</p>	Diskes	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<p><i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i> 5.535 -----x100%= 72,17%</p> <p><i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota</i> 7.669</p>	Diskes	
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	<p><i>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i> 127.73 Ha -----x100%=14,78%</p> <p><i>Luas kawasan permukiman rawan banjir</i> 864 Ha</p>	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<i>di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i>		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)</i> 11,63 -----x100%=18,23% <i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)</i> 63,80	Dis PUPR	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	<i>Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi danelihara (ha)</i> 280,17 Ha -----x100%= 5,92% <i>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota</i> 4.727 Ha	Dis PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	<i>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota</i> 437.250 Jiwa -----x100%=92,67% <i>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut</i> 471.820 Jiwa	Dis PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	<i>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</i> 3.237 +123.861 -----x100%= 89,96% <i>Jumlah rumah di Kabupaten Kota</i> 141.281 KK	Dis PUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	<i>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya</i> 99 -----x100%= 4,37%	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			Jumlah IMB yang berlaku 2.262		
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap 852,27 Km -----x100%= 70,87% Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota 1.202,54 Km	Dis PUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis 9 -----x100%= 60% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota 15	Dis PUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 0 -----x100%= 0% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 39	Dis PUPR	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n -----x100%= 0 Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Dis Perkim	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni -----x100%= 0 Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	Dis Perkim	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) 79,90 -----x100%= 643,84% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha 12,41	Dis Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	<i>Jumlah unit rumah tidak layak huni.</i> 8.121 -----x100%=5,30% <i>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota</i> 153.125	Dis Perkim	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	<i>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah unit rumah kab/kota</i>	Dis Perkim	
5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	<i>Jumlah pengaduan yang ditangani</i> 55 -----x100%= 91,67% <i>Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk</i> 60	Satpol PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	<i>Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan</i> 11 -----x100%= 100% <i>Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi</i> 11	Satpol PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	<i>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 519.998 Orang</i>	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<i>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 519.998 Orang</i>	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<i>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 18 Orang</i>	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman</i>	Dis Damkar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<i>di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah</i> $\frac{20}{66} \times 100\% = 30,30\%$		
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	<i>Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran = $\frac{1.857}{66} = 17,53$ menit</i>	Dis Damkar	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	<i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i> $\frac{496}{6.662} \times 100\% = 7,45\%$	Disos	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</i> $\frac{70}{70} \times 100\% = 100\%$	Disos	

3. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya.

3.1 Hasil EPPD

Hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) pada tahun 2019, untuk Kabupaten Karangasem berada pada peringkat ke-8 (delapan) dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Bali. Skor yang diperoleh Kabupaten Karangasem sebesar **3.2456** dengan tingkat prestasi **tinggi**.

3.2 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 dari BPKP, Kabupaten Karangasem masih tetap meraih opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK RI.

4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

1) Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 1.455.141.988.165,53, Secara rinci realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No.	Jenis Pendapatan	Realisasi
I.	Pendapatan Asli Daerah	216.682.876.355,05
1	Hasil Pajak Daerah	66.452.673.379,75
2	Hasil Retribusi Daerah	9.301.444.071,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.968.117.309,66
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	128.960.641.594,64
II.	Dana Perimbangan	918.022.076.402,00
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.582.034.404,00
2	Dana Alokasi Umum	713.291.169.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	182.148.872.998,00
III.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	320.437.035.408,48
1	Pendapatan Hibah	69.924.120.999,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5.911.697.367,89
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.250.487.000,00

4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	33.547.042.455,00
5	Pendapatan Lainnya	81.803.687.586,59
	JUMLAH =	1.455.141.988.165,53

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

2) Realisasi Belanja

Belanja Daerah setelah sembilan kali mengalami penyesuaian melalui Perubahan Penjabaran APBD, target dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.6
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No.	Jenis Belanja	Realisasi
I.	Belanja Tidak Langsung	941.915.043.047,48
1	Belanja Pegawai	667.752.396.767,97
2	Belanja Bunga	2.785.820,91
3	Belanja Hibah	65.381.481.651,72
4	Belanja Bantuan Sosial	1.042.261.000,00
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11.558.024.859,79
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	176.547.740.848,00
7	Belanja Tak Terduga	19.630.352.099,09
II.	Belanja Langsung	490.119.080.585,11
1	Belanja Pegawai	64.949.430.400,00
2	Belanja Barang dan Jasa	352.725.567.410,55
3	Belanja Modal	72.444.082.774,56
	JUMLAH =	1.432.034.123.632,59

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

5. Realisasi Penerimaan Menurut Jenis Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran Menurut Jenis Pengeluaran, dan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.

- Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 1.455.141.988.165,53 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.510.576.917.062,23 atau 96,33% dari yang ditargetkan. Secara rinci, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.8
Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No.	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
I.	Pendapatan Asli Daerah	207.905.009.114,20	216.682.876.355,05	104,22%
1	Hasil Pajak Daerah	60.391.998.711,00	66.452.673.379,75	110,04%
2	Hasil Retribusi Daerah	8.580.762.000,00	9.301.444.071,00	108,40%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.968.117.309,66	11.968.117.309,66	100,00%
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	126.964.131.093,54	128.960.641.594,64	101,57%
II.	Dana Perimbangan	946.516.771.974,00	918.022.076.402,00	96,99%
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.597.564.974,00	22.582.034.404,00	81,83%
2	Dana Alokasi Umum	716.253.373.000,00	713.291.169.000,00	99,59%
3	Dana Alokasi Khusus	202.665.834.000,00	182.148.872.998,00	89,88%
III.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	356.155.135.974,03	320.437.035.408,48	89,97%
1	Pendapatan Hibah	68.365.798.978,65	69.924.120.999,00	102,28%
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	131.531.146.245,38	5.911.697.367,89	72,92%
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.250.487.000,00	39.250.487.000,00	100,00%
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	35.204.047.750,00	33.547.042.455,00	95,29%
5	Pendapatan Lainnya	81.803.656.000,00	81.803.687.586,59	100,00%
	JUMLAH =	1.510.576.917.062,23	1.455.141.988.165,53	96,33%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

Tabel diatas menyajikan bahwasannya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu melampaui target yang disesuaikan dalam Perubahan APBD, yaitu terealisasi sebesar Rp.216.682.876.355,05 dari yang ditargetkan sebesar Rp.207.905.009.114,20 atau 104,22%. Sedangkan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masing-masing terealisasi lebih kecil dari yang ditargetkan (kurang dari 100%).

- Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah setelah sembilan kali mengalami penyesuaian melalui Perubahan Penjabaran APBD, target dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.9
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No.	Jenis Belanja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
I.	Belanja Tidak Langsung	1.030.322.509.335,80	941.915.043.047,48	91,42%
1	Belanja Pegawai	706.131.471.727,80	667.752.396.767,97	94,56%
2	Belanja Bunga	100.000.000,00	2.785.820,91	2,79%
3	Belanja Hibah	65.853.888.978,65	65.381.481.651,72	99,28%
4	Belanja Bantuan Sosial	1.750.000.000,00	1.042.261.000,00	59,56%
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11.558.235.078,48	11.558.024.859,79	100%
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	178.574.948.000,00	176.547.740.848,00	98,86%
7	Belanja Tak Terduga	66.353.965.550,87	19.630.352.099,09	29,58%
II.	Belanja Langsung	583.078.720.080,96	490.119.080.585,11	84,06%
1	Belanja Pegawai	71.429.041.662,00	64.949.430.400,00	90,93%
2	Belanja Barang dan Jasa	415.825.587.461,73	352.725.567.410,55	84,83%
3	Belanja Modal	95.824.090.957,23	72.444.082.774,56	75,60%
	JUMLAH =	1.613.401.229.416,76	1.432.034.123.632,59	88,76%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

Dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.1.613.401.229.416,76 terealisasi sebesar Rp.1.432.034.123.632,59 atau 88,76%. Secara lebih rinci, realisasi belanja daerah yang realisasinya sangat rendah diantaranya dari jenis Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Bunga terealisasi 59,56% dan Belanja Tak Terduga terealisasi 29,58%. Sedangkan pada jenis Belanja Langsung yang terealisasi sangat rendah adalah Belanja Modal terealisasi 75,60%.

- Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.102.969.312.354,53 dan terealisasi sebesar Rp.102.972.554.540,53 atau 100,00% lebih, yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) Tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.102.969.340.904,53 dan terdapat realisasi penerimaan pada pos Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp.3.213.636,00.


Tabel 1.10
Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No.	Jenis Pembiayaan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
I.	Penerimaan Pembiayaan	102.969.312.354,53	102.972.554.540,53	100,00%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	102.969.312.354,53	102.969.340.904,53	100,00%
2	Penerimaan Piutang Daerah	-	3.213.636,00	-
II.	Pengeluaran Pembiayaan	145.000.000,00	65.436.458,22	45,13%
1	Pembayaran Pokok Utang	145.000.000,00	65.436.458,22	45,13%
	Pembiayaan netto =	102.824.312.354,53	102.907.118.082,31	100,08%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

Sedangkan dari sisi pengeluaran Pembiayaan direncanakan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp.145.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.65.436.458,22 atau 45,13%.

Dari ringkasan total Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah maka dapat diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran berkenaan adalah sebesar Rp.126.014.982.615,25.

Amlapura, 26 Maret 2021
Bupati Karangasem, 

I Cede Dana